

# MEMO HUKUM

**MOCHAMAD NASIR**

**PEMANFAATAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM  
USAHA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
(TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN  
NEGERI MOJOKERTO NO. 1/PRA/PID/1994/PN.MKT.)**



KK.  
Pid: 670/95  
Nas  
P

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
"UNIVERSITAS AIRLANGGA"  
SURABAYA

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
1995**

**PEMANFAATAN LEMBAGA PRAPERADILAN DALAM  
USAHA PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN  
(TINJAUAN YURIDIS ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN PENGADILAN  
NEGERI MOJOKERTO NO. 1/PRA/PID/1994/PN.MKT.)**



**MEMO HUKUM**

**DIAJUKAN SEBAGAI PENULISAN SKRIPSI  
PROGRAM SARJANA BIDANG ILMU HUKUM**

**Pembimbing**

**RICHARD WAHJOEDI, SH., MS.**

**NIP. 130 631 815**

**Penyusun**

**MOCHAMAD NASIR**

**NIM. 039113346**

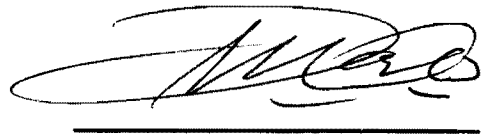
**TELAH DIUJI PADA :**

**H a r i : Jum'at**

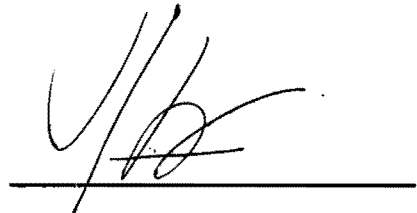
**Tanggal : 27 Januari 1995**

**TIM PENGUJI :**


**Ketua : S O E D A R T I, S.H.**



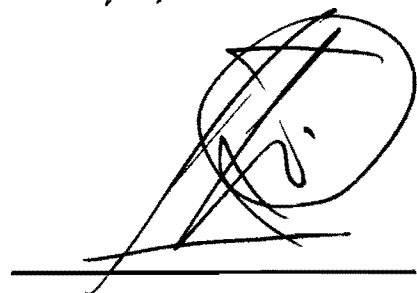
**Sekretaris : S O E H A R J O, S.H.**



**Anggota : S O E H A R J O, S.H.**



**RICHARD WAHJOEDI, SH., MS.**



cukup beralasan karena kurangnya alat bukti yang berakibat sulitnya pembuktian tindak pidana pencemaran lingkungan dan untuk menentukan adanya hubungan kausal antara perbuatan tersangka PT. Pakerin dengan tercemarnya Sungai Porong.

## V. PENUTUP

### 1. KESIMPULAN

- A. Pengertian pihak ketiga yang berkepentingan dalam Pasal 80 KUHP untuk masalah lingkungan harus dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup dimana dalam kasus pencemaran dan atau kerusakan lingkungan terkait dengan adanya kepentingan publik dan kepentingan ekologis. Karena lingkungan hidup sebagai subyek hukum maka berhak melakukan perbuatan hukum dengan adanya pihak yang mewakilinya. Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan dapat bertindak mewakili lingkungan dengan mengatasnamakan kepentingan umum untuk beracara di sidang pemeriksaan praperadilan.
- B. Perbuatan melanggar baku mutu air limbah tidaklah identik dengan perbuatan mencemari air (Sungai Porong) sehingga perbuatan melanggar baku mutu air limbah untuk dapat diproses sebagai perkara pidana pencemaran maka

unsur delik lingkungan sebagai delik materiil harus dapat dibuktikan. Dasar hukum yang dipakai adalah Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 413 Tahun 1987 tentang Penggolongan dan Baku Mutu Air di Jawa Timur. Cara pembuktian didasarkan kepada baku mutu air sebelum limbah PT. Fakerin dibuang. Apabila setelah limbah dibuang penggolongan dan baku mutu air Sungai Porong menjadi turun kualitasnya maka diduga kuat PT. Fakerin dengan limbahnya telah mencemari Sungai Porong.

## 2. SARAN-SARAN

- A. Sebaiknya ada tolak ukur yang jelas bahwa hanya lembaga swadaya masyarakat yang secara nyata, terus-menerus dan membuktikan bergerak serta peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan daya dukung lingkungan untuk memiliki kewenangan berperkara baik pada sidang perkara pidana maupun sidang perkara perdata.
- B. Asas Strict Liability menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu diatur lebih lanjut penjabarannya guna mempermudah proses pembuktian dalam hal terjadi pencemaran dan atau kerusakan lingkungan serta untuk menggantikan asas Liability Based on Fault yang dianut oleh KUHP.